

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengetian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diartikan pengawasan dan pengendalian, dikalangan ahli atau sarjana pengertian *controlling* ini disamakan dengan pengawasan. Makmur, (2015:175) pengawasan didefinisikan serangkaian usaha yang tersusun oleh manajemen bisnis untuk mengukur kinerja standar, rencana, tujuan yang telah dibentuk sebelum kegiatan dilakukan agar kinerja sejalan dengan tujuan dan capaian yang sudah ditetapkan sehingga mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Menurut Goer R.tery (Mukarom&Lesmana,2015:156) mengidentifikasi penetapan tertentu sebelum aktivitas dimulai, diikuti dengan penerapan cara-cara korektif sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Menurut Robbin menyatakan bahwa pengawasan sebagai suatu proses dasar bagi manajer di dalam organisasi untuk menjalankan pekerjaan dan tugas.

Sondang P.Siagian (Makmur, 2015:176) menjelaskan pengawasan merupakan kegiatan melihat langsung dan menyeluruh rangkaian aktivitas pada organisasi

Yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas kegiatan dilakukan selaras dengan SOP yang dibuat sebelum kegiatan dimulai, dapat disimpulkan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas maupun efisiensi dari suatu pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Implementasi dan pekerjaan dari instansi publik yang sudah terencana, dibutuhkan aktivitas pengawasan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas agar sesuai dengan yang hendak di inginkan serta terstruktur pada rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah, pengawasan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dengan implementasi, tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan, ini dimaksudkan untuk:

- 1) Mengetahui lancar dan tidaknya aktivitas sebuah pekerjaan.
- 2) Meminimalisir kesalahan-kesalahan para pegawai dan pencegahan atas permasalahan yang akan terjadi sehingga tidak berulang.
- 3) Melihat dan mengamati teknis dalam kegiatan kerja sejalan dengan *planing* yang telah dibuat atau tidak.

Maksud tujuan dalam sebuah pengawasan, juga jelaskan oleh Situmorang dan Juhir (Mukarom & Lesmana 2015) mendefinisikan pengawasan memiliki fungsi agar terciptanya lingkungan yang jujur serta transparansi terhadap publik dan memerlukan stakeholder untuk terlibat di dalamnya yang meliputi masyarakat, dalam bentuk pengawasan *control of public*, yang sehat, objektif dan bertanggung jawab.

Melihat hal ini berdasarkan berbagai penelitian bahwa yang menjadi pokok dari tujuan sebuah pengawasan yaitu membandingkan antara pelaksanaan dan perencanaan telah di tetapkan sebelumnya, apakah ada kendala, kekurangan, serta efisiensi dan efektifitas kerja dan mencari solusi jika ada hambatan, kekurangan.

2.1.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan dapat dikelompokkan yaitu (Mukarom & Lesmana 2015:158) :

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.

Pengawasan secara langsung dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang pada level *top management* yang melakukan kegiatan secara langsung meliputi melihat secara langsung proses kegiatan, survei dan lainnya. Pengawasan tidak langsung dalam hal ini dilakukan dalam bentuk melihat beberapa laporan maupun baik secara tertulis maupun melalui data-data yang sudah dikumpulkan.

2) Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan Preventif yaitu kegiatan pengawasan sebelum kegiatan dilakukan agar meminimalisir terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Pengawasan. Represif merupakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilakukan seperti kegiatan audit, evaluasi dan sebagainya.

3) Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan Internal yaitu kegiatan dilaksanakan oleh pegawai publik yang terlibat langsung didalam suatu organisasi terkait. Pengawasan eksternal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh luar organisasi bisa

dalam bentuk saran maupun kritik agar tujuannya mampu memperbaiki hal-hal yang menyimpang. Pengawasan pada segi finansial dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta direktorat jenderal agar seluruh kegiatan maupun pelaksanaan yang dilaksanakan pemerintah tidak menyimpang. Pengawasan berdasarkan bidang pengawasannya dapat di kelompokkan, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- 2) Pengawasan biaya (*cost control*)
- 3) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- 4) Pengawasan produksi (*production control*)
- 5) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

2.1.4 Tahap Pengawasan

Donelly (Mukarom&Lesmana,2015:161) membagi pengawasan menjadi 3 (tiga) cara sebagai berikut :

- 1) *Preliminary Control* memiliki peran setiap usulan anggaran baik dari segi harga layanan, *ouput*, maupun *outcomes* dari setiap jenis layanan.
- 2) *Interim Control* dimaksudkan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tempo waktu tertentu.
- 3) *Post Control* memastikan layanan yang sesuai untuk pengevaluasian terhadap target yang direncanakan.

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit 5 (lima) Handoko,(2015: 360) tahap pengawasan yaitu :

- 1) Penetapan standar pelaksanaan sebagai suatu “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat dengan beberapa pertanyaan berapa kali, dalam bentuk apa, dan siapa saja yang terlibat.
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
 Dalam hal ini implementasi kegiatan dilihat secara konsisten baik dalam melihat secara langsung serta mempelajari data-data yang ada serta evaluasi kegiatan yang nyata.
- 4) Perbandingan pelaksanaan serta standar dan penganalisaan, penyimpangan untuk menentukan mengapa standar tidak tercapai, untuk membuat keputusan mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan prosedur.
- 5) Pengambilan tindakan untuk memperbaiki suatu kegiatan yang menyimpang dengan melalui proses evaluasi

2.1.4 Teknik-Teknik Pengawasan

Metode pengawasan terdiri dari 2 (dua) bentuk diantaranya metode bukan kuantitatif (*non quantitative*) dan metode kualitatif :

- 1) Metode pengawasan non kuantitatif metode pengawasan yang digunakan manejer dalam pelaksanaan fungsi manajemen pada umumnya hal ini mengawasi keseluruhan (*overall performace*) organisasi dan sebagian

mengawasi sikap dan *performace* para karyawan. Teknik yang sering digunakan meliputi :

- a) Pengamatan (*Control by Observation*)
 - b) Inspeksi teratur dan langsung (*Control by Regular and Spot Observation*)
 - c) Pelaporan lisan dan tertulis (*Control by Report*)
 - d) Evaluasi pelaksanaan.
 - e) Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.
- 2) Teknik pengawasan kuantitatif lebih berfokus untuk menggunakan data khusus dan metode-metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran (*Out-put*) yang meliputi :
- a) Anggaran *Budget*
 - b) Audit (Internal, Eksternal dan Manajemen Audit)
 - c) Analisis *Break Even*
 - d) Analisis Rasio

2.1.6 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko,(2015:371) Pengawasan memiliki beberapa ciri-ciri yang efektif dan efisien yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Akurat

Dalam hal ini data mengenai informasi wajib sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

- 2) Tepat waktu

Penyampaian data dan informasi serta pengawasan sesuai dengan waktu yang ditetapkan agar dapat dilakukan audit serta koreksi secepatnya.

3) Objektif dan Menyeluruh.

Informasi mengenai pengawasan harus adil dan merata sehingga tidak ada tumpang tindih yang mengakibatkan kerusakan struktur pengawasan.

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi.

Dalam hal ini kegiatan pengawasan lebih memusatkan perhatian pada problematika yang didahulukan bersifat urgent dan harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar.

5) Realistik secara ekonomis.

Anggaran kegiatan pelaksanaan harus minimal setara dengan modal yang dikeluarkan dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan

6) Realistik secara organisasional.

Prosedur pengawasan wajib selaras dengan data dan fakta-fakta disebuah organisasi.

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Penyampaian informasi wajib dilakukan secara transparan dan menjalin kerjasama agar tidak ada kesalahan komunikasi di dalam seluruh tingkatan pegawai dalam organisasi tersebut

8) Fleksibel

Aktivitas pengawasan wajib menjangkau berbagai aspek sehingga keefektifan organisasi dapat terjaga secara konsisten

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.

Dalam pengawasan wajib memiliki acuan standar yang telah ditetapkan sebagai tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan

10) Diterima para anggota organisasi

Organisasi pengawasan tentu harus menjangkau dari berbagai aspek sehingga pelaksanaan kegiatan mampu disetujui oleh seluruh stakeholder organisasi agar tidak menimbulkan kesalahan fatal dalam pelaksanaan kegiatan serta mampu dipertanggung jawabkan.

2.1.7 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengawasan

Menurut Abdurrahman (Syafie 2011:110) ada beberapa faktor-faktor yang dapat berperan dalam mengendalikan dan mencegah kasus penyalahgunaan kekuasaan, termasuk:

- 1) Kebijakan diterapkan
- 2) Mendukung anggaran pembiayaan
- 3) Penempatan karyawan dan prosedur kerja
- 4) Stabilitas koordinasi dalam organisasi

Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, pengawasan itu membutuhkan pemikiran yang sudah terbiasa dengan lingkungan, menanamkan rasa keyakinan seseorang pada agama sehingga seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dan menjalankan perintahnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah atau pekerjaan, karena setiap tindakan yang dilakukan akan dihargai dan percaya bahwa setiap pekerjaan selalu diperhatikan.

Melaksanakan pekerjaan apapun, kebijakan yang ditetapkan dan tidak melanggar kebijakan yang ada, penyediaan biaya atau anggaran untuk memperlancar setiap kegiatan dan kebutuhan akan pelaksanaan pengawasan, sehingga proses pengawasan tidak terhambat. Menempatkan karyawan sesuai

dengan kemampuannya dan sesuai dengan tempat yang dibutuhkan adalah hal utama, karena setiap pekerjaan harus dilakukan berdasarkan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya dan sesuai dengan keahliannya, sehingga pada masa-masa sulit karyawan dapat menanganinya dengan baik dan tepat.

2.1.8 Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pengawasan

Menurut Mulyadi, (2013:170) mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah :

- 1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
- 2) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
- 3) Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

2.1.9 Obat dan Makanan

1) Obat

Pengertian obat dalam peraturan kementerian kesehatan (Kemenkes) Nomor 73 Tahun 2016 merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki fungsi fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

2) Makanan

Merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan.

3) Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kosmetik merupakan sediaan atau paduan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.(Tranggono&Latifah, 2013:7)

2.1.10 Pengawasan Balai Obat dan Makanan (BPOM)

Pengawasan obat makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri mengacu terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Obat dan Makanan. Proses pengawasan dilaksanakan melalui hasil barang yang telah diproduksi melalui beberapa pengecekan secara ilmiah sehingga di temukan bahwa produksi yang dihasilkan memiliki kelayakan untuk di konsumsi serta menjalin kerjasama antar instansi agar pelaksanaan kinerja lebih mudah.(Laporan kinerja BPOM di Batam 2018)

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar rencana dan produk, penilaian produk yang di daftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan dan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk diperedaran atau sarana distribusi, pengawasan produk ilegal palsu dan tiruan yang merugikan konsumen.

- 2) Pengawasan secara eksternal perlu dilaksanakan yaitu dilakukan dengan memiliki tujuan untuk mengevaluasi mengenai kelayakan produk yang di produksi sehingga mampu segera dilakukan perbaikan terkait beberapa pengaduan serta saran dari penggunaan produk tersebut.

Prinsip dasar dari sistem pengawasan obat dan makanan antara lain:

- 1) Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.
- 2) Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat rasio dan berbasis bukti ilmiah.
- 3) Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup siklus proses.
- 4) Berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan lintas internasional.
- 5) Memiliki jaringan laboratorium nasional yang konfensif dan kuat berkolaborasi dengan jaringan global.
- 6) Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

2.2 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan Ilham Wijaya,(2016) yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Kepulauan Riau terhadap penetapan Standar mutu produk air minum dalam kemasan (AMDK) di Kota Tanjung Pinang” dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 No 2 ISSN 2354-5798. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. hasil peneltian pengawasan terhadap mutu Produk air minum dalam Kemasan (AMDK) yang sudah teregistrasi di Kota Tanjung Pinang oleh BPOM Kepulauan Riau, yaitu tahap awal yaitu menentukan standarisasi alat pengukuran, dengan hasil penelitian yaitu pengawasan

sarana pengelolaan pangan air minum dalam kemasan (AMDK) dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam rangka mengawasi penerapan cara produksi pangan olahan yang dilakukan oleh Industri Pangan melalui kerangka pengawasan *Pre market* dan *Post market* menggunakan ceklis baku, masih belum sesuai dengan fakta dilapangan. Langkah yang diambil sesudahnya adalah data-data yang didapat dalam mengukur permasalahan yang ada di lapangan, dan hasil didapat masih ada penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah&Ernawaty,(2014) yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Produk Obat dan Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)” dalam Jurnal Online mahasiswa fakultas sosial dan ilmu Politik Universitas Riau (JOM UNRI) Volume 4 No 3 ISSN 2275-4477-1 penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan produk dan makanan impor oleh Balai Besar Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator seperti, standar pangan melakukan tindakan penilaian dan koreksi menghasilkan kategori “CUKUP BAIK” di sebabkan masih banyak didapati jenis produk minuman dan makanan impor ilegal di pasar-pasar yang tidak ada label BPOM serta mengandung bahan yang berbahaya yang tidak layak untuk di konsumsi adapuan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan produk impor baik makanan dan minuman oleh BPOM di pekanbaru yaitu: intensitaas dalam pengawasan

masih dalam dalam kategori “KURANG BAIK” yang disebabkan kurang efektifnya dan efisiennya sitem pengawasan yang dilakukan.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Addul Haris & Heri Kuswanto, (2016) yang berjudul “Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai” dalam jurnal Administrasi Publik, Volume 6 (1) Juni 2016.p-ISSN: 2088-527x e-ISSN: 25748-7787 penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian kegiatan sistem pengawasan yang dilakukan baik pengusutan dan pemeriksaan sudah sangat baik serta kuantitas dalam pengawasan dan ke akuratan data yang di laporkan oleh inspektorat kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan data dan fakta dilapangan, namun ada faktor yang mempengaruhi dalam aktivitas pengawasan yaitu, masih kurangnya jumlah pegawai serta kurangnya sarana prasaran sehingga belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Serdang Bedagai.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Angriawan & Dyah Mutiarin, (2019) yang berjudul ”Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru” dalam *journal of government and Civil Society*, Volume 3, No 1 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X. Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian makanan impor ilegal masih banyak didapati dan diperdagangkan oleh para pedagang UMKM di Kota Pekanbaru oleh karena itu wajib di berikan sanksi yang tegas oleh BPOM untuk melindungi masyarakat sehingga terciptanya rasa aman bagi

masyarakat sebagai konsumen jika diukur dari indikator pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal yang disebabkan minimnya jumlah pegawai serta kurangnya sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan sehingga belum tercapainya pengawasan yang ideal dan efektif di Kota Pekanbaru.

- 5) Penelitian yang dilakukan Febi Febiola,(2017) yang berjudul“ Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru”dalam jurnal *Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI) Volume 4 No.2 Oktober 2017,E-ISSN : 2355-6919*. penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian terhadap pengawasan peredaran produk pangan minuman impor di Kota Pekanbaru disimpulkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal, tidak optimalnya pengawasan BPOM dan DISPERINDAG Kota Pekanbaru menimbulkan dampak masih banyak beredarnya produk-produk minuman impor yang tidak tertjamin keamanannya di Kota Pekanbaru serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk yang baik untuk di konsumsi, adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan Disperindag di Kota Pekanbaru disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang diantaranya kurangnya kendaraan operasional, mengakibatkan belum efektifnya pengawasan dan penyuluhan pada masyarakat terhadap peredaran produk minuman impor yang masih banyak di temui oleh masyarakat.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Adek Fitri, (2019) yang berjudul “Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru” dalam dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI) Volume 6 : edisi 1 Januari-Juni 2019, ISSN: 2355-6919 E-ISSN: 23853-46253. Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, hasil penelitian Balai POM di Kota Pekanbaru belum efektif ini terlihat dalam hasil penelitian, Balai POM harus lebih rutin terhadap inspeksi dan pengecekan peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru apabila inspeksi dan razia rutin dan menyeluruh ini dapat meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru serta pemberian sanksi tegas dan efek jera bagi mereka yang sengaja mengedarkan dan memper jual belikan kosmetik ilegal tersebut. Pengawasan kosmetik merupakan tugas bagi Balai POM di Kota Pekanbaru, akan tetapi jumlah pegawai yang ada pada bidang pemeriksaan dinilai kurang memadai dalam melakukan secara menyeluruh oleh karena itu Balai POM harus melakukan penambahan pegawai sehingga pengawasan akan lebih meningkat. Balai juga wajib meningkatkan partisipasi masyarakat berupa sosialisasi dengan cara Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ditempat yang sebagian besar penggunanya remaja seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Tinggi dan tempat keramaian seperti *Car Free Day* di Kota Pekanbaru.
- 7) Penelitian yang dilakukan Ayu Mulyani Noor, (2015) yang berjudul “Pengawasan Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pekanbaru” dalam jurnal *Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI)* Volume 2.No.2 Oktober 2015. ISSN : 2355-6919 , E-ISSN : 5486-10785

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan produk makanan kaleng BPOM Kota Pekanbaru masih belum merata keseluruhan makanan dan minuman yang ada di Kota Pekanbaru ini menyebabkan masih adanya makanan dan minuman yang lepas dari pengawasan. Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru masih memiliki keterbatasan jumlah pegawai dalam melakukan tugas pengawasan pada sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru, kemudian pihak BPOM jarang mensosialisasikan tujuan dan maksud pemeriksaan dan beranggapan bahwa para pelaku usaha sudah mengetahui maksud dan tujuan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran produk pangan ilegal (Makanan Kaleng) oleh BPOM di Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia dan kendaraan operasional dan partisipasi masyarakat masih rendah sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Heru Irianto Dkk,(2019) dengan judul *“The policy and Supervision by Government of circulation Alcoholic Beverage in East Java,Indonesia”* dalam *Journal Of Drug and Alcohol Research* Vol 8 2019. Hasil penelitian penyalahgunaan provinsi Jawa Timur telah memberlakukan Peraturan Daerah 6 No 6 Tahun 2014 tentang kontrol dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kontrol dan

pengawasan instrumen dan distribusi dari minuman tersebut dilakukan dengan pemberlakuan kenaikan harga dan lebel sirkulasi. setiap orang yang melanggar lisensi ketentuan dalam sirkulasi bisnis dan penjualan minuman beralkohol tunduk pada administrasi sanksi untuk pemegang SIUP-MB dan siapapun dalam bisnis sirkulasi dan penjualan dikenakan sanksi pidana minimal 6 (Enam) bulan dan denda maksimal 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)

2.3 Kerangka Berfikir

